

Lesson Learn Pengelolaan Sektor Infrastruktur Perumahan di Kawasan Perbatasan Indonesia dan Malaysia

Mendra Wijaya^{1*}, Muslimin Wallang², Panca Setyo Prihatin³

^{1, 3} Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

² College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia, Kedah, Malaysia

*mendrawijaya@soc.uir.ac.id

Received 10-11-2023

Revised 14-11-2023

Accepted 18-11-2023

ABSTRAK

Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menyediakan perumahan layak bagi warganya. Malaysia sebagai negara berkembang berperan dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Begitu juga Indonesia, Pemerintah berupaya maksimal dalam penyediaan perumahan bagi warga negara. Perguruan tinggi berkontribusi dalam pembangunan suatu negara. Salah satunya dalam pengelolaan kawasan perbatasan sektor infrastruktur perumahan. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui diskusi dengan pendekatan *lesson learn* dari kontributor, komparasi pengalaman perguruan tinggi yang dilibatkan pemerintah dalam pengelolaan kawasan perbatasan sektor infrastruktur perumahan. Hasil kegiatan ini menunjukkan peran penting perguruan tinggi dalam pengelolaan wilayah perbatasan sektor infrastruktur perumahan memberikan kontribusi besar dalam perencanaan pembangunan suatu Negara. Hal tersebut dilihat dari keterlibatan perguruan tinggi di Malaysia yang tidak hanya sebagai *thinktank* dalam arsitektur Pembangunan, namun mencakup berbagai kajian kebijakan pembangunan. Sehingga, beberapa hal dapat diadopsi dalam keterlibatan perguruan tinggi di Indonesia khususnya di Provinsi Riau dalam perencanaan pengelolaan wilayah perbatasan di sektor infrastruktur perumahan.

Kata kunci: Infrastruktur; Perumahan; Kawasan Perbatasan.

ABSTRACT

The government has a responsibility to provide adequate housing for its citizens. As a developing country, Malaysia plays a role in providing adequate and affordable housing for the community. Likewise, in Indonesia, the government is making maximum efforts to provide housing for its citizens. Higher education contributes to the development of a country. One of them is in managing border areas in the housing infrastructure sector. The method of community service activities is carried out through discussions using a lesson-learned approach from contributors, comparing the experiences of universities involved by the government in managing border areas in the housing infrastructure sector. The results of this activity show the critical role of universities in managing border areas in the housing infrastructure sector, making a significant contribution to a country's development planning. That can be seen from the involvement of universities in Malaysia, which are not only think tanks in development architecture but also include various development policy studies. So, several things can be adopted in the involvement of universities in Indonesia, especially in Riau Province, in planning border area management in the housing infrastructure sector.

Keywords: Infrastructure; Housing; Border Area.

PENDAHULUAN

Sebagai daerah yang memiliki berbagai wilayah perbatasan antar negara harus menjadi beranda depan Negara baik di Malaysia maupun di Indonesia. Tentunya harus

memiliki keunggulan dan daya saing yang dapat meningkatkan keunggulan lokal dan regional sehingga daerah perbatasan memiliki posisi tawar ketika berhadapan dengan negara tetangga. Namun pada kenyataannya, kawasan perbatasan merupakan halaman belakang yang perlu diurus, kondisi infrastrukturnya buruk, dan masyarakat cenderung tertinggal. Sedangkan wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia cukup berkembang; tata ruang sosial dan ekonominya sangat terintegrasi; penduduk yang ingin bekerja dan tinggal di kawasan ini disubsidi oleh Negara sehingga keadaan ekonomi dan kesejahteraannya setara dengan penduduk di perkotaan.

Badan Publik di Malaysia memulai pengembangan program perumahan murah publik pedesaan di tahun 1950 yang diluncurkan oleh *Housing Trust* untuk mewakili Pemerintah Federal. Itu adalah upaya pertama oleh pengembang sektor publik untuk mengembangkan *Low Cost Housing* (LCH) di Malaysia. Pada tahun 1957, pembangunan perumahan murah masyarakat pedesaan secara aktif berpartisipasi dengan wilayah pemerintah negara bagian. *Housing Trust* dibubarkan pada tahun 1972 dan kegiatannya di semua program pengembangan perumahan dialihkan untuk dikembangkan oleh *National Housing Department* (NHD). Singkatnya, perumahan berbiaya rendah di Malaysia telah diperkenalkan dengan pedoman resmi dalam Rencana Malaysia Keempat (1981-1985). Sejak periode itu, pemerintah memastikan setiap 5 tahun rencana pembangunan harus terus menekankan pengembangan perumahan murah untuk kelompok berpenghasilan rendah. Perumahan menjadi suatu azas sehingga Kerajaan Malaysia menjadikan sebagai agenda sosial untuk menangani masalah kebutuhan papan yang kian serius. Oleh karena itu kerajaan persekutuan memainkan peranan penting agar program yang dilancarkan ini tepat sasaran dengan memberi perhatian atas kualitas dan kuantitas sehingga produk tersebut memenuhi kehendak rakyat (Wahid, 2014). Tujuan formal dari kebijakan perumahan Malaysia adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, mempunyai akses terhadap tempat tinggal yang layak dan layak. (Saleh *et al.*, 2022).

Pemerintah Malaysia telah meluncurkan banyak jenis skema perumahan umum selama 20 tahun terakhir, tetapi sebagian besar skema ini gagal memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi penghuninya. Bahkan, banyak pembangunan perumahan yang didasarkan pada skema ini telah berubah menjadi permukiman kumuh yang tidak menyediakan lingkungan yang sehat bagi keluarga. Secara umum, kedua skema perumahan yang terjangkau telah meningkatkan ruang lingkup orang yang mampu membeli unit-unit ini dengan menjual di bawah harga pasar. Namun, hal tersebut sebenarnya tidak mengatasi masalah pasokan. Pengembang perumahan belum memberikan prioritas pada program perumahan yang terjangkau karena tingkat profitabilitas yang rendah. Oleh karena itu, perumahan yang terjangkau dalam jangkauan keuangan rumah tangga muda perkotaan masih kekurangan pasokan dan jauh dari memuaskan kebutuhan perumahan mereka.

Sedangkan di Indonesia, dinamika penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan fenomena yang

menarik dari urusan pemerintahan wajib lainnya (Wijaya & Handrisal, 2021). Pembangunan perumahan merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Mengingat kompleksitas pembangunan perumahan tersebut tentunya diperlukan kapasitas kelembagaan yang kuat dan andal, baik di tingkat pemerintahan pusat yang mempunyai kewenangan langsung dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun bagi pemerintah daerah untuk ikut berperan dan memfasilitasi kebutuhan penyediaan rumah tersebut.

Hasil pendataan terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (2019), total pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tahun 2015-2019 adalah sebanyak 928 ribu, yang terdiri dari 49 ribu unit rusun terbangun, 700 ribu peningkatan kualitas rumah swadaya, 35 ribu unit pembangunan baru rumah swadaya, 24 ribu pembangunan rumah khusus, serta 119 ribu unit bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan. Kemudian di tahun 2020-2021, capaian pembangunan Ditjen Perumahan adalah sebanyak 373 ribu unit, yang terdiri dari 7.847 unit rusun terbangun, 360 ribu peningkatan kualitas rumah swadaya, 4.866 pembangunan rumah khusus, serta 37 ribu unit bantuan PSU perumahan. Capaian Program Sejuta Rumah tahun 2021 tersebut terdiri dari 826.500 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 279.207 unit rumah non MBR (Wardana et al., 2023).

Dari uraian diatas tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan informasi tentang bagaimana keterlibatan perguruan tinggi sebagai *stakeholders* dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan khususnya dalam pembangunan infrastruktur perumahan di wilayah perbatasan, sehingga nantinya dapat diambil adopsi program yang ada di Kedah, Malaysia dan dapat menjalin kemitraan dalam pengembangan kajian pembangunan infrastruktur perumahan bersama Universitas Islam Riau. Selama ini kajian-kajian infrastruktur dimoninasi keilmuan diluar rumpun ilmu sosial, di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, melihat pengelolaan wilayah perbatasan khususnya pembangunan infrastruktur perumahan di kawasan perbatasan dari aspek ilmu-ilmu sosial agar mendapatkan contoh kasus yang dapat di adopsi dari Universiti Utama Malaysia dalam keterlibatan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan bidang perumahan di kawasan perbatasan agar dapat di adopsi dalam perencanaan pengelolaan Kawasan perbatasan sektor infrastruktur perumahan di Provinsi Riau.

METODE PELAKSANAAN

Lingkup kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa lingkup *sharing knowledge* perguruan tinggi antara Universitas Islam Riau dan Universiti Utara Malaysia. Sasaran utamanya adalah eksistensi kontribusi perguruan tinggi terhadap pengelolaan kawasan perbatasan di sektor infrastruktur perumahan dan permukiman.

Tim pengabdian melakukan kegiatan diskusi dengan metode *lesson learn* pada setiap kontributor, memberikan komparasi dari berbagai pengalaman perguruan tinggi yang dilibatkan pemerintah dalam perencanaan pengelolaan kawasan perbatasan di sektor infrastruktur perumahan dan permukiman masyarakat perbatasan dan penyampaian materi (ceramah) tentang pengelolaan kawasan perbatasan dan diskusi.

HASIL KEGIATAN

Peran Pemerintah Indonesia dan Malaysia Dalam Pembangunan Perumahan

Pembangunan perumahan di Malaysia dan Indonesia merupakan upaya yang signifikan dan kompleks, dimana masing-masing negara memiliki peraturan, kondisi pasar, dan faktor budaya yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur perumahan tersebut. Dalam upaya Pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat di negara tersebut dapat memiliki rumah, berbagai strategi dan tindakan telah diambil oleh Pemerintah di tingkat Federal dan Negara Bagian. Penyediaan perumahan yang terjangkau merupakan salah satu langkah penting dalam strategi Pemerintah untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Langkah ini juga diwujudkan dalam Kebijakan Penyediaan Perumahan Nasional (2013-2017) yang bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan berkualitas dengan fasilitas dan lingkungan yang kondusif, meningkatkan akses dan kemampuan masyarakat untuk memiliki atau menyewa rumah, dan menjamin keberlanjutan sektor perumahan di masa depan.

Untuk meningkatkan pasokan perumahan yang terjangkau, Pemerintah Federal dan Negara Bagian telah membentuk berbagai lembaga dan memperkenalkan program khusus yang memungkinkan M40 memiliki rumah. Di tingkat federal, berdirinya Perusahaan Perumahan Malaysia ke-1 atau PR1MA, Rumah Wilayah Federal (RUMAWIP) di bawah Wilayah Federal, Rumah Mesra Rakyat (RMR), Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah (SPNB), Pegawai Negeri Sipil Malaysia (PPAM) di bawah Departemen Perumahan Nasional (JPN), KPKT. Di tingkat negara bagian, penyediaan kebijakan perumahan terjangkau seperti Rumah Selangorku (Selangor), Rumah Terjangkau Johor (Johor) dan PR1MA Pahang (Pahang). Fokus dari perumahan terjangkau ini adalah kelompok M40, yang berpenghasilan antara RM2,500 dan RM7,500 sebulan. Sedangkan harga yang ditawarkan kepada pembeli tersebut berkisar antara RM100.000 hingga RM 300.000 per unit.

Saat ini kesadaran masyarakat terhadap keterjangkauan perumahan dan perumahan terjangkau semakin meningkat (Anacker, 2019). Ketika permintaan perumahan meningkat pesat dalam konteks lokal karena kekuatan ekonomi non-fundamental, banyak pemerintah mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan untuk mengurangi permintaan dan menstabilkan pasar perumahan (Galster & Lee, 2020). Pembangunan perumahan sering dipandang dengan pesimisme sebagai usaha yang semata-mata berorientasi pada keuntungan, dimana hasilnya ditentukan oleh kekuatan pasar (Shamsuddin, 2020).

Selama beberapa tahun terakhir, Malaysia berfokus pada peningkatan infrastruktur di wilayah perbatasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan memperkuat keamanan nasional. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Malaysia merupakan upaya maksimal yang berpotensi mengubah wilayah ini menjadi pusat perekonomian yang dinamis. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas, pendidikan, layanan kesehatan, dan kelestarian lingkungan serta kawasan permukiman menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Malaysia.

Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan letak geografis yang unik, terdiri dari ribuan pulau. Banyak dari pulau-pulau ini berbatasan darat dengan negara-negara tetangga, dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan ini sangatlah penting. Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia merupakan tantangan dengan banyak pemangku kepentingan dan kompleksitasnya. Jelas bahwa meskipun terdapat tantangan yang besar, terdapat pula komitmen bersama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di kawasan ini dan meningkatkan kerja sama lintas batas. Menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting. Hal ini memerlukan kerja sama yang berkelanjutan, pendanaan yang memadai, dan perencanaan yang matang.

Tabel 1. Perbandingan Pembangunan Perumahan Indonesia dan Malaysia

Malaysia	
Regulasi	Pembangunan perumahan di Malaysia mengikuti regulasi termasuk yang berkaitan dengan penggunaan lahan, zonasi, dan pertimbangan lingkungan. Pengembang biasanya perlu mendapatkan izin yang diperlukan dari otoritas setempat.
Tipe Perumahan	Pembangunan perumahan di Malaysia dapat mencakup beragam pilihan, mulai dari kondominium dan rumah susun di kawasan perkotaan hingga landed house dan komunitas yang terjaga entitasnya di kawasan pinggiran kota dan pedesaan. Ada juga pasar yang berkembang untuk perumahan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Kondisi Pasar	Kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, dan sentimen konsumen sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi.
<i>Sustainability</i>	Praktik bangunan ramah lingkungan dan fitur hemat energi menjadi lebih umum.
Indonesia	
Regulasi	Pembangunan perumahan di Indonesia tunduk pada peraturan pemerintah pusat serta peraturan daerah, dalam perizinan tertentu yang berbeda-beda pada masing-masing daerah.

Tipe Perumahan	Perumahan di Indonesia bervariasi dari perumahan tradisional pedesaan hingga pembangunan perkotaan modern.
Kondisi Pasar	Pasar properti Indonesia sedang mengalami pertumbuhan, didorong oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, pertumbuhan populasi, dan meningkatnya permintaan perumahan kelas menengah.
<i>Sustainability</i>	Perumahan yang terjangkau merupakan perhatian penting di Indonesia, dan pemerintah mengambil inisiatif untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai program dan kebijakan.

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber, 2023.

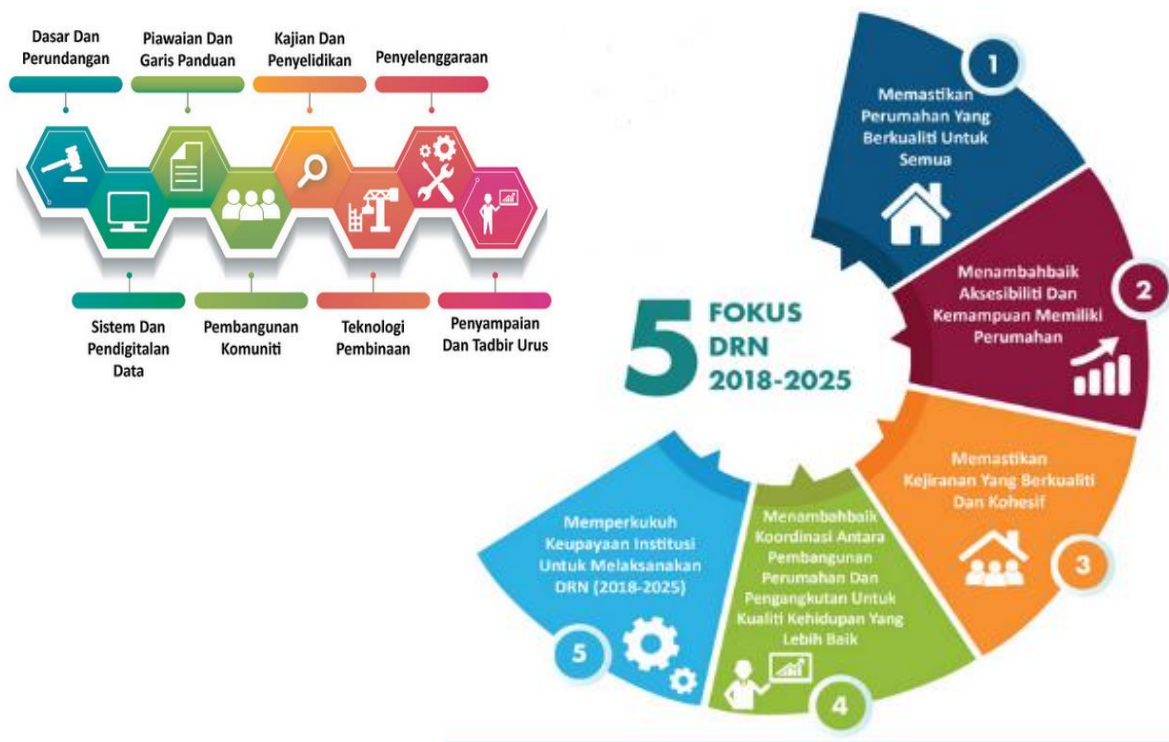
Dalam konteks pasar perumahan Malaysia, berbagai aktor (yaitu pembuat kebijakan, pengembang perumahan, pembeli rumah, asosiasi dan kelompok kepentingan sosial lainnya) berinteraksi di berbagai tingkatan untuk mengatasi masalah perumahan (Cheah *et al.*, 2020). Kemampuan memiliki rumah seringkali bergantung pada perilaku belanja pendapatan rumah tangga yang ada (Majid *et al.*, 2021). Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam membuat keputusan pembelian atau investasi. Mereka yang berpenghasilan menengah dan rendah juga akan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran bulanan mereka dalam menentukan kawasan terbaik untuk tinggal (Rosli Said *et al.*, 2017).

Pilihan perumahan yang terjangkau di wilayah perbatasan Malaysia dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan wilayah tertentu. Daerah perbatasan seringkali berpenduduk lebih sedikit dan mungkin menawarkan perumahan yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kota-kota besar. Sesuai dengan cita-cita Malaysia untuk menjadi negara maju dengan perekonomian berpendapatan tinggi, industri perumahan harus adaptif dan responsif terhadap permintaan kelompok khusus, terutama masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah (Osman *et al.*, 2017). Namun, masih terdapat warga negara di Malaysia terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah merasa sangat sulit untuk memiliki rumah. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya akses terhadap fasilitas pembiayaan (Maamor *et al.*, 2016).

Di Malaysia, perumahan yang terjangkau ditawarkan oleh tiga tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah federal, negara bagian, dan pemerintah daerah yang masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab berbeda. Masalah keterjangkauan perumahan di Malaysia sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan dan pertumbuhan pendapatan yang lebih lambat (Hamid, 2019). Pemerintah federal merumuskan kebijakan dan pedoman untuk pembangunan dan perencanaan perumahan yang terjangkau; pemerintah negara bagian menyediakan lokasi yang sesuai sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas persetujuan rencana dan permohonan pembangunan (Tan *et al.*, 2020). Selama beberapa dekade, pemerintah Malaysia telah mengambil inisiatif berbeda dan fokus pada kelompok sasaran berbeda dalam pembangunan

perumahan terjangkau. Pada masa awal, prinsip pembangunan perumahan terjangkau adalah menyediakan perumahan murah bagi kelompok berpendapatan rendah. Beberapa daerah perbatasan di Malaysia yang menyelenggarakan perumahan terjangkau yaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Sabah dan Sarawak serta Perak. Kedah adalah negara bagian utara yang berbatasan dengan Thailand. Kota-kota seperti Alor Setar dan Sungai Patani mungkin menawarkan pilihan perumahan yang lebih terjangkau, terutama dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Kebijakan nasional Malaysia ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan saat ini. Karena Kebijakan Perumahan Nasional (DRN) 2013-2017 telah berakhir, Kementerian Perumahan Rakyat dan Pemerintahan Daerah (KPKT) telah melakukan evaluasi ulang DRN yang ada untuk mengidentifikasi kesenjangan yang akan digunakan sebagai dasar untuk menguraikan kebijakan dan strategi baru DRN (2018 -2025). DRN (2018-2025) dimaksudkan untuk merinci kebijakan dan rencana aksi periode 2018-2025 dengan mempertimbangkan permasalahan perumahan saat ini. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai kerangka nasional dalam memandu pembangunan perumahan di tingkat Federal dan Negara Bagian dan merupakan katalis dalam penyediaan perumahan secara sistematis, dan berdasarkan permintaan dan kebutuhan perumahan. Kebijakan perumahan yang komprehensif dan sejalan dengan kebutuhan saat ini sangat penting dalam memastikan pengembangan kota-kota dan daerah perkotaan yang layak secara ekonomi.



Gambar 1. Fokus Dasar Perumahan Negara (DRN) Malaysia 2018-2025

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kota tanpa kumuh pada tahun 2030. Hal ini telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang

berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau secara bertahap untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Berdasarkan data Susenas tahun 2020, persentase rumah layak huni secara nasional mencapai 59,54%, artinya masih terdapat 40,46% atau 29,4 juta rumah tangga di Indonesia yang masih tinggal di rumah tidak layak huni.

Dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan penyediaan perumahan vertikal di perkotaan, khususnya wilayah metropolitan, sebagai proyek besar di bidang perumahan yang dikenal dengan Program Sejuta Rumah Susun dalam Kerangka Perumahan Rakyat. Pemerintah mendorong penyediaan 500 ribu rumah susun sewa dan 500 ribu rumah susun milik selama lima tahun ke depan. Inisiatif ini perlu disambut baik karena masyarakat perkotaan akan diberikan pilihan berdasarkan sistem karir perumahan yang akan dilalui sesuai dengan perkembangan jumlah keluarga dan tingkat kematangan lainnya seperti pendapatan.



Gambar 2. Target Nasional Pembangunan Perumahan Dalam RPJMN 2020-2024
Sumber : Kementerian Bappenas, 2020

Perumahan di Indonesia dibagi beberapa jenis yaitu Rumah Komersil, Rumah Swadaya, Rumah Umum, Rumah Negara dan Rumah Khusus (Wijaya *et al.*, 2023). Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Untuk kategori infrastruktur wilayah perbatasan, pembangunan perumahan masuk dalam jenis rumah khusus.

Lesson Learn Peran Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Infrastruktur Perumahan Kawasan Perbatasan di Malaysia dan Indonesia

Eksistensi Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara. Pemerintah, dalam melaksanakan pembangunan tidak hanya melibatkan sektor swasta namun membutuhkan *stakeholders* lainnya yaitu Perguruan Tinggi. Bentuk keterlibatan Pembangunan tersebut dapat berupa

kolaborasi dan lainnya sehingga entitas non pemerintahan dapat berpartisipasi dalam Pembangunan nasional. Kolaborasi menjadi langkah strategis dalam mencapai inovasi Pembangunan. Dengan adanya kolaborasi, diharapkan dapat mendorong pencapaian target yang lebih inklusif, akseleratif, dan konkrit dalam mencapai realisasi program pembangunan.

Berbagai model kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti *Triple Helix* yaitu kolaborasi antara pemerintah, bisnis dan perguruan tinggi. Prinsip *triple helix* merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang menjadi bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, peran perguruan tinggi belum maksimal karena masih relatif sedikit pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kolaborasi (Rahman & Warsono, 2019). Tidak maksimalnya pemerintah dalam memanfaatkan eksistensi perguruan tinggi dan dunia usaha dapat dilihat dari rendahnya koordinasi yang ada, sehingga ketiga bagian tersebut tidak terintegrasi secara optimal (Asmaddin et al., 2022). Keterlibatan stakeholders dalam kolaborasi dapat terjadi perbedaan dalam pola kolaborasi. Bentuk kolaborasi berikutnya yaitu *Penta Helix* dengan interaksi lima aktor pemangku kepentingan yaitu *academician, business, community, government, media* (ABCGM). Dari interaksi lima faktor tersebut dapat dilihat kecenderungan kondisi antara pengaruh atau kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan antar *stakeholders* (Rokhmat et al., 2022).

Kebijakan perumahan melibatkan sejumlah isu kompleks. Berbagai kontribusi akademis dan kebijakan menyoroti sejauh mana kebijakan perumahan seringkali bertentangan dan bertentangan, dibandingkan mengikuti arah yang koheren. Di Malaysia, pembangunan perumahan dilakukan oleh tiga sumber: sektor publik, sektor swasta, dan koperasi. Pembangunan proyek perumahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini pada dasarnya didasarkan pada bentuk perencanaan ekonomi yang sama dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Rencana Lima Tahun Malaysia. Pada dasarnya hampir sama dengan Indonesia, pembangunan perumahan bagian dari perencanaan Pembangunan nasional dalam dokumen rencana jangka menengah nasional (RPJMN). Pembangunan perumahan khususnya perumahan terjangkau, selain dibangun oleh pemerintah juga pengembang swasta dan *stakeholders* lainnya.

Perguruan Tinggi memiliki memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan perumahan di wilayah perbatasan Kedah Malaysia, seperti halnya di wilayah mana pun. Keterlibatan akademisi dapat membantu memastikan bahwa pembangunan perumahan berkelanjutan, terencana, dan menjawab kebutuhan dan tantangan unik di wilayah tertentu. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan perumahan di wilayah perbatasan Kedah Malaysia.

Tabel 2. Bentuk Peran Keterlibatan Perguruan Tinggi di Malaysia Dalam Kolaborasi Pembangunan Infrastruktur Perumahan di Kawasan Perbatasan

Objek Analisis	Peran Perguruan Tinggi
Regulasi	Perguruan Tinggi dapat menganalisis kebijakan dan peraturan yang ada terkait dengan pembangunan perumahan di wilayah tersebut dan membuat rekomendasi perbaikan atau perubahan agar dapat lebih melayani kepentingan masyarakat.
Sosial Ekonomi	Pembangunan perumahan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan dinamika sosial. Perguruan Tinggi dapat menilai dampak ekonomi dan sosial dari pembangunan perumahan untuk memastikan bahwa hal tersebut bermanfaat bagi masyarakat setempat.
Perencanaan Infrastruktur	Perguruan Tinggi dapat membantu merencanakan infrastruktur yang diperlukan, seperti jalan, utilitas, dan layanan publik, untuk mendukung pembangunan perumahan di wilayah perbatasan Kedah Malaysia.
Penelitian dan Analisis Data	Perguruan Tinggi dapat melakukan penelitian mengenai pasar perumahan lokal, tren populasi, kondisi ekonomi, dan faktor lingkungan di wilayah perbatasan Kedah Malaysia
Partisipasi Masyarakat	Perguruan Tinggi dapat memfasilitasi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan perumahan. Mereka dapat membantu menciptakan platform bagi warga untuk berpartisipasi dan membuka ruang penyampaian aspirasi, memastikan bahwa pembangunan sejalan dengan kebutuhan masyarakat

Begitu pula dengan manajemen wilayah perbatasan Indonesia yang sangat beragam menuntut Indonesia untuk melakukan pemberdayaan wilayah dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kontribusi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga perguruan tinggi. perguruan tinggi diharapkan berkontribusi dalam hal inovasi serta mendorong keterlibatan masyarakat khususnya di daerah perbatasan. Kajian di wilayah perbatasan di Indonesia cukup banyak yang dilakukan oleh berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, namun hasil kajian tersebut hanya sebatas rekomendasi saja, belum digunakan sepenuhnya dalam perencanaan Pembangunan di wilayah perbatasan khususnya bidang infrastruktur perumahan.

Kajian yang bersifat implementatif dan aplikatif sebatas Pembangunan perkotaan. Studi tentang pembangunan infrastruktur perkotaan memang lebih dominan dengan alasan mencari solusi pertambahan penduduk, laju migrasi yang berimplikasi terhadap aspek sosial ekonomi serta kebutuhan hunian masyarakat yang bertumpu pada wilayah kota-kota besar di Indonesia. Fokus pembangunan wilayah perbatasan paling dominan di Provinsi Kalimantan Timur karena berbatasan langsung dengan Negara Bagian Malaysia Timur (Serawak dan Sabah). Namun masuh terdapat

kesenjangan pembangunan daerah perbatasan dengan Malaysia, menimbulkan potensi kerawanan di bidang sosial ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara. Pembangunan bertumpu pada aksestabilitas wilayah perbatasan. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur memfokuskan pengembangan kawasan perbatasan melalui beberapa strategi, yang salah satunya adalah perluasan ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur dasar wilayah, transportasi dan telekomunikasi.

Secara keseluruhan, perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai pusat pengetahuan dan fasilitator dalam perencanaan pembangunan perumahan di wilayah perbatasan Kedah Malaysia, membantu memastikan bahwa perumahan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah lingkungan, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan wilayah secara keseluruhan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan *stakeholders* sangat penting untuk keberhasilan perencanaan pembangunan perumahan.



Gambar 3. Seremonial Kegiatan PKM Internasional Universitas Islam Riau (UIR) dengan Universiti Utara Malaysia (UKM), Kedah, 2023.



Gambar 4. *Sharing Knowledge* Peran Perguruan Tinggi Dalam Kolaborasi Pembangunan

Solusi atas permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan pengelolaan wilayah perbatasan di sektor infrastruktur perumahan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kewenangan pemerintah yakni:

1. Memberikan gambaran yang komprehensif terkait dengan langkah-langkah konkrit yang bisa dilakukan untuk merencanakan pembangunan perumahan dan infrastruktur permukiman di wilayah perbatasan. Mengingat pemerintah hanya

berfokus pada pengembangan wilayah perkotaan yang berimplikasi kepada semakin terisolasinya masyarakat di daerah-daerah perbatasan.

2. Sharing Informasi antar kedua Negara dalam pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan sebagai salah satu pemecahan masalah dengan arahan dan diskusi pada konteks studi kasus dari negara-negara lain.
3. Pengembangan jaringan perguruan tinggi sebagai *think-tank* dalam rangka memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan di sektor infrastruktur perumahan dan permukiman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan perumahan memegang peranan penting dalam mengatasi permasalahan perumahan di berbagai negara. Indonesia dan Malaysia, dua negara tetangga di Asia Tenggara, memiliki perbedaan yang signifikan dalam kebijakan perumahan. Perbandingan kebijakan perumahan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan pendekatan dan prioritas dalam menangani permasalahan perumahan. Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, kedua negara dapat belajar satu sama lain untuk memperbaiki kebijakan perumahan mereka sekaligus memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap perumahan yang terjangkau. Dari hal demikian dapat diambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya kontribusi perguruan tinggi sebagai *think tank*.

Hasil diskusi dan *sharing session* antara Universitas Islam Riau dan School of Government, Universiti Utara Malaysia menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki kontribusi besar dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan kawasan perbatasan di sektor infrastruktur perumahan. Prioritas pembangunan perumahan di wilayah perbatasan memang masih relatif sedikit dan hal ini memerlukan kajian lebih lanjut dalam rangka aksestabilitas masyarakat yang tinggal di perbatasan. Sehingga hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat menjadi rekomendasi kemitraan antara Universitas Islam Riau dan School of Government Universiti Utara Malaysia untuk mengembangkan kajian pengelolaan wilayah perbatasan di sektor infrastruktur perumahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada College of Law, Government and International Studies (COLGIS) Universiti Utara Malaysia sebagai mitra yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat internasional, serta Rektor Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anacker, K. B. (2019). Introduction: Housing Affordability and Affordable Housing. *International Journal of Housing Policy*, 19(1), 1–16.
<https://doi.org/10.1080/19491247.2018.1560544>

- Asmiddin, A., Sadat, A., & Basir, M. A. (2022). Kolaborasi Triple Helix Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Buton. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 8(1), 71–82. <https://doi.org/10.33172/jmb.v8i1.960>
- Cheah, C. W., Low, B., & Lee, C. K. C. (2020). Sustainable housing development: the legitimacy-seeking perspective. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 36(6), 1027–1041. <https://doi.org/10.1108/JBIM-07-2020-0318>
- Galster, G., & Lee, K. O. (2020). Housing Affordability: A Framing, Synthesis of Research and Policy, and Future Directions. *International Journal of Urban Sciences*, 25(S1), 7–58. <https://doi.org/10.1080/12265934.2020.1713864>
- Hamid, Z. A. (2019). Rethinking Affordable Housing in Malaysia: Issue and Challenges. In *Journal of Affordable Housing & Community Development Law* (Vol. 20, Issue 2). Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB).
- Maamor, S., Shuib, M. S., & Harun, S. L. (2016). Accessibility of low income earners to home financing: A case study in Kedah. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7), 279–282.
- Majid, R. A., Said, R., Rahim, N. A., Basrah, N., Sahray, K., Mustafar, S., & Mahamood, N. M. (2021). The Influence of Expenditure Behaviour Towards Homeownership. *Jurnal Intelek*, 16(1), 244–254. <https://doi.org/10.24191/ji.v16i1.341>
- Osman, M. M., Rabe, N. S., Abdullah, M. F., Rosli, N. F., & Zainudin, F. E. (2017). Housing affordability in the state of Melaka. *Planning Malaysia*, 15(1), 255–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.21837/pm.v15i1.241>
- Rahman, A. Z., & Warsono, H. (2019). Kolaborasi Triple Helix Dalam Pembangunan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN*, 7(1), 25–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.47828/jianaasian.v7i01.22>
- Rokhmat, D. F., Suwaryo, U., & Mulyawan, R. (2022). Perbandingan Kolaborasi Penta Helix Dalam Pengembangan Potensi Unit Pelaksana Teknis Menjadi Badan Layanan Umum (Studi di UPTD Cimahi Techno Park dan UPTD Solo Techno Park Tahun 2021). *Jurnal Academia Praja*, 6(1), 177–189. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v6i1.1080>
- Rosli Said, Rohayu Ab Majid, Md Nasir Daud, Zulkifli Esha, & Muhammad Najib Razali. (2017). Owners' Perception Towards Sustainable Housing Affordability in Kuching, Sarawak. *Journal of Design and Built Environment*, 17(S.I), 194–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.22452/jdbe.sp2017no1.16>
- Saleh, A. F., Ab Majid, R. A. M., Rahim, N. A. R., & Omar, M. D. O. (2022). Housing Supply Model for Affordable Homes in Malaysia. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 7(22), 127–133. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i22.4159>
- Shamsuddin, S. (2020). Preservation Planning: Redeveloping Public and Affordable Housing. *Journal of Planning Education and Research*, 43(4), 857–868. <https://doi.org/10.1177/0739456X20925162>
- Tan, H. Y. Q., Lim, P. I., & AbdulLateef, O. (2020). Sustainability of Affordable Housing: A Review of Assessment Tools. *International Transaction Journal of Engineering*,

Management, & Applied Science & Technologies, 11(8), 1–10.
<https://doi.org/10.14456/ITJEMAST.2020.157>

- Wardana, D., Ismail, S., Wijaya, M., Riau, U. I., City, P., Province, R., Kedah, S., & Aman, D. (2023). HOUSING POLICY DYNAMICS: CAN THE GOVERNMENT MEET HOUSING NEEDS FOR LOW-INCOME COMMUNITIES? *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 79–93. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v9i1.44779>
- Wijaya, M., & Handrisal, H. (2021). Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 37–51. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01.3579>
- Wijaya, M., Zanariah, Rosalin, N., Yuliani, I. K., Purba, T. P., Dinihari, T. R., Ernamayanti, & Saragih, J. (2023). Dinamika Kebijakan dan Praktik Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman. In *Madza Publishing*. Madza Publishing.